

PERAN KOPERASI DESA DI SENTRA PRODUKSI PADI DALAM UPAYA MEMPERKECIL BIAYA MODAL^a

Oleh:

NAJIB ASMANT^b

^aMakalah pada Seminar Nasional Penguatan Agribisnis Perberasan
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 6-7 Mei 2012.

^bProgram Studi Agribisnis Fakultas Pertanian/PPS Universitas Sriwijaya,
Ketua PERHEPI Komda Palembang dan Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan
Kampus Inderalya KM 32 Ogan Ilir Palembang, Indonesia. Kode Pos 30662
Telp/Faks: +62711580662 HP: +62811715025

email: jib_mania@yahoo.com www.perhepipalembang.wordpress.com

ABSTRAK

Upaya peningkatan pendapatan petani dari kegiatan usahatani padi sering menghadapi kendala dalam penyediaan modal pengadaan sarana produksi pupuk dan penjualan hasil. Petani sering mengakses modal melalui pengusaha penggiling padi, pedagang sarana produksi, atau petani kaya pemilik modal. Keterikatan petani dengan penyedia modal berlanjut terus sampai pada penjualan hasil panen, dimana hutang dibayar dengan hasil padi atau disebut sistem *yarnen*. Bila diperhitungkan, harga pupuk lebih tinggi dan harga padi lebih rendah dari harga pasar lokal. Sistem *yarnen* berakibat tingginya biaya modal yang dibayar oleh petani. Keberadaan koperasi yang dikelola secara profesional di sentra produksi padi dapat merupakan suatu upaya membantu petani dalam penyediaan modal dengan biaya rendah. Tujuan penyajian makalah ini untuk menganalisis besarnya biaya modal yang dikeluarkan oleh petani padi melalui sistem *yarnen*, serta kinerja koperasi yang dikelola oleh kelompok profesi guru di sentra produksi padi yang mampu menyediakan modal dengan biaya rendah. Analisis data dari data sekunder, yang diolah dari beberapa hasil penelitian yang menyangkut sistem *yarnen* dan pengelolaan koperasi desa. Diperoleh hasil analisis bahwa dengan sistem *yarnen*, biaya modal yang ditanggung oleh petani dalam satu kali musim tanam padi yakni sebesar 60 persen atau 15 persen sebulan. Petani dalam semusim tanam padi kehilangan penerimaan hampir satu juta rupiah. Biaya modal petani bila dihitung dari total kehilangan penerimaan menjadi sekitar 112 persen sebulan. Kinerja koperasi yang dikelola para guru hanya membebankan bunga modal bagi para anggota koperasi sebesar 18,5 persen per tahun atau 1,54 persen sebulan.

Kata Kunci:

Biaya Modal, Kinerja Koperasi, Penerimaan Petani

LATAR BELAKANG

Lahan rawa lebak adalah kantong penyangga produksi padi yang pemanfaatan lahannya bertujuan untuk peningkatan produksi padi dan perbaikan kesejahteraan petani pengelolanya (Noor, 2007). Lahan rawa lebak tergolong lahan basah dengan genangan air yang cukup panjang sekitar 8 sampai 9 bulan dengan sistem hidrologi yang buruk dan pengetusan yang lambat (Arifin dan Susanti, 2005). Potensi lahan rawa lebak di Indonesia mencapai 13,30 juta hektar, dengan potensi yang terluas yakni Papua 6,31 juta hektar, Kalimantan 3,58 juta hektar dan Sumatera 2,77 juta hektar. Total rawa lebak yang baru dimanfaatkan sekitar 0,48 juta hektar (Widjaya Adhi, *et.al.*, 2000).

Petani dalam kegiatan usahatani padi persawahan rawa lebak memerlukan modal untuk membeli sarana produksi. Upaya peningkatan produksi dan pendapatan sering

menghadapi kendala karena terbatasnya sumber modal yang mudah, cepat dan murah. Petani yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal sering mengaksesnya melalui tengkulak atau penyedia modal yang berada di sentra produksi. Keterikatan petani dengan tengkulak berlanjut terus sampai pada penjualan hasil panen, dimana hutang dibayar dengan hasil padi atau disebut sistem *yarnen*. Bila diperhitungkan, harga pupuk lebih tinggi yang mengakibatkan tingginya biaya modal yang menjadi beban petani (Afriyatna *et.al.*, 2011).

Keberadaan koperasi yang dikelola secara profesional di sentra produksi padi dapat merupakan suatu upaya membantu petani dalam penyediaan modal dengan biaya rendah. Koperasi yang memberikan pinjaman modal kepada petani dengan bunga rendah akan mempengaruhi juga bagi tengkulak di sekitar wilayah tersebut untuk tidak membebani petani dengan bunga yang relatif tinggi (Asmani *et.al.*, 2011).

TUJUAN

Tujuan penyajian makalah ini untuk menganalisis besarnya biaya modal yang dikeluarkan oleh petani padi pada persawahan lebak melalui sistem *yarnen*, serta kinerja koperasi yang dikelola oleh kelompok profesi guru di sentra produksi padi yang mampu menyediakan modal dengan biaya rendah.

METODE PENELITIAN

Analisis data dalam penghitungan biaya modal dan kehilangan pendapatan petani sistem *yarnen* yakni diolah dari data hasil penelitian Afriyatna *et.al.* (2011). Analisis kinerja koperasi yang dibentuk oleh kelompok profesi guru dengan cara perhitungan biaya modal dan penerimaan dari kegiatan koperasi simpan pinjam (KSP) yang diolah dari hasil penelitian Asmani *et.al.* (2011). Metode penghitungan dirumuskan:

$$BMSY_1 = SN/NPST \quad (1)$$

$$BMSY_2 = BMSY_2/4 \quad (2)$$

$$RH_1 = PSY (HpST - HpSY). \quad (3)$$

$$RH_2 = (PSY - PK) \times (HpST - HpSY) + BMSY_1 \quad (4)$$

$$BMSY_2 = RH_2/NPST \quad (5)$$

$$BMSY_3 = BMSY_2/4 \quad (6)$$

dimana:

$BMSY_1$: Biaya modal sistem *yarnen* (SY) dari total nilai pupuk (%)

$BMSY_2$: Biaya modal SY dari total nilai pupuk per bulan (%)

$BMSY_2$: Biaya modal SY dari total produksi yang dijual (%)

$BMSY_3$: Biaya modal SY dari total produksi per bulan (%)

SN : Selisih nilai jual padi dengan nilai beli pupuk antara SY dengan sistem tunai (ST) satu musim tanam (Rp/ha)

NPST : Nilai pemakaian ST (Rp/ha)

RH_1 : Kehilangan penerimaan SY dari nilai pupuk (Rp/ha)

RH_2 : Kehilangan penerimaan SY dari total penerimaan (Rp/ha)

PSY : Produk padi yang diperoleh oleh petani SY (kg/ha/MT)

PK : Padi yang dikonsumsi petani SY (kg/kk/tahun)

HpST : Harga jual padi ST saat panen di pasar lokal (Rp/ha)

HpSY : Nilai pemakaian pupuk ST (Rp/ha)

Biaya modal atau bunga pinjaman pada KSP yang dibentuk oleh kelompok profesi guru sudah merupakan ketetapan rapat anggota yakni sebesar 3,00 persen dari sisa cicilan dalam jangka tertentu, dimana bila diperhitungkan secara *flat* dengan besarnya biaya modal sebesar 18,50 persen per tahun atau 1,54 persen per bulan.

HASIL PENELITIAN

Biaya Modal dan Penerimaan Petani

Upaya peningkatan produksi dari kegiatan usahatani di persawahan lebak memerlukan sarana produksi pupuk. Bagi petani yang tidak mampu, sumber modal atau pinjaman pupuk berasal dari tiga sumber utama yakni pengusaha penggiling padi, pedagang kios pupuk, dan petani pemilik modal. Kebutuhan pupuk per hektar yakni 50 kg Pupuk Urea dan 50 kg Pupuk SP36. Pupuk diambil pada waktu pengolahan lahan dan dibayar setelah panen atau sistem *yarnen* dalam jangka waktu sekitar empat bulan. Pembayaran hutang berdasarkan kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan setempat, dibayar dengan hasil padi sebesar 120 kg gabah kering giling (Afriyatna *et.al.* 2011). Kondisi tersebut menyebabkan besarnya biaya modal tanggungan petani (Tabel 1).

Tabel 1. Analisis biaya modal dan margin pendapatan antara petani sistem *yarnen*^{a)}

No.	Uraian	Sistem <i>yarnen</i> (SY)	Sistem tunai (ST)	Selisih (SY – ST)
1.	Harga pupuk urea (Rp/kg)		1.700,00	
2.	Harga pupuk SP36 (Rp/kg)		2.500,00	
3.	Nilai 1 kg urea + 1 kg SP36	6.000,00	4.200,00	+1.800,00
4.	Jumlah pemakaian urea (kg/ha)	50	50	0
5.	Jumlah pemakaian SP36 (kg/ha)	50	50	0
6.	Jumlah pemakaian pupuk (kg/ha)	100	100	0
7.	Nilai pemakaian pupuk (Rp/ha)	300.000,00	210.000,00	+90.000,00
8.	Harga jual gabah waktu panen (Rp/kg)	3.200,00	3.500,00	-300,00
9.	Nilai 120 kg padi (Rp)	384.000,00	420.000,00	-36.000,00
10.	Selisih nilai padi dengan nilai pupuk	84.000,00	210.000,00	-126.000,00
11.	Biaya modal pupuk petani SY/mt (%)			60
12.	Biaya modal pupuk petani SY (%/bulan)			15

^{a)}Data diolah dari sumber hasil penelitian Afriyatna *et.al.* 2011: [Thesis].

Dari hasil analisis pada tabel di atas bahwa harga pupuk sebagai beban petani sistem *yarnen* lebih mahal sebesar 42,86 persen jika dibeli secara tunai atau sebesar 90 ribu rupiah per musim tanam. Dengan keharusan membayar hasil kepada tengkulak dalam bentuk gabah, maka terdapat selisih harga sebesar 300 rupiah per kilogram. Biaya modal yang harus dibayar petani yakni sebesar 15 persen per bulan.

Petani yang terjebak dalam sistem *yarnen*, biasanya dalam kegiatan pengolahan lahan dan upah tenaga kerja luar keluarga membutuhkan pinjaman biaya dari tengkulak., bahkan termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Seluruh hutang-hutang dibayar petani dengan gabah pada waktu panen padi (Fitriyana *et.al.*, 2011). Dari kondisi tersebut, sebagai gambaran, dengan asumsi bila seluruh hasil padi yang diperoleh dalam satu musim tanam, setelah dikurangi untuk konsumsi keluarga per tahun, dijual petani kepada tengkulak, maka besarnya biaya modal dapat mencapai 112 persen per bulan. Petani menderita kehilangan penerimaan bila seluruh hasil padi setelah dipotong konsumsi dijual kepada tengkulak (Tabel 2). Fitriyana *et.al.* (2011) melaporkan bahwa

pada persawahan pasang surut terdapat perbedaan perolehan pedapatan, dimana petani dengan sistem tunai memperoleh selisih sebesar 2,77 juta rupiah per hektar per musim tanam dibandingkan dengan petani sistem *yarnen*.

Tabel 2. Asumsi besarnya biaya modal petani sistem *yarnen* pada usahatani padi lebak^a

No.	Uraian	Nilai
1.	Produksi padi petani SY (kg GKG/ha)	3.600
2.	Konsumsi beras (kg, setara GKG dengan rendemen 65%) dengan 4 anggota keluarga (kebutuhan beras Sumsel 124 kg/kapita/tahun)	765
3.	Padi yang terjual kelebihan konsumsi (kg)	2.835
4.	Kehilangan penerimaan SY/mt dari harga jual padi (Rp/ha)	850.500,00
5.	Biaya modal pupuk SY per musim tanam (Rp/ha)	90.000,00
6.	Kehilangan penerimaan petani SY/mt dari harga jual ditambah biaya modal pupuk padi (Rp/ha)	940.500,00
7.	Biaya modal pupuk SY dari total kehilangan pendapatan per mt dengan menjual seluruh hasil kepada peminjam modal (%)	448
8.	Biaya modal pupuk SY dari total kehilangan pendapatan per bulan dengan menjual seluruh hasil kepada peminjam modal (%)	112

^aData diolah dari sumber hasil penelitian Afriyatna *et.al.* 2011: [Thesis].

^bDengan asumsi bila petani menjual seluruh hasilnya ke pemberi modal

Kinerja Koperasi

Asmani *et.al.* (2011) melaporkan bahwa beberapa orang guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Desa Kertamukti Jalur 27 Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan pada Tahun 1993 memprakarsai membentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang diberi nama Koperasi Pegawai Negeri Karya Usaha. Keanggotaan koperasi pada awalnya bersifat eksklusif hanya untuk guru dan pegawai negeri yang ada di desa tersebut dan beberapa desa sekitarnya yang merupakan sentra produksi padi lahan pasang surut. Mulai Juni 2004, keanggotaannya diperluas yang terbuka bagi masyarakat umum. Anggota tetap koperasi sebanyak 148 orang yang semuanya PNS. Jumlah masyarakat umum yang dilayani sebanyak 2.798 kepala keluarga, termasuk 609 kepala keluarga di Desa Kertamukti. Visi koperasi adalah menuju lembaga keuangan pedesaan yang kuat berbasis sumberdaya lokal, dengan mengemban misi untuk melayani pinjaman modal usaha dan penyediaan kebutuhan hidup bagi anggota, serta santunan sosial bagi anggota yang terkena musibah. Anggota koperasi, istri dan anak bila sakit dirawat inap masing-masing mendapat bantuan sebesar 750, 600 dan 500 ribu rupiah. Santunan kematian bagi anggota sebesar tiga juta rupiah.

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa kinerja KSP Karya Usaha dari hasil RAT Tahun 2010 memberikan SHU sekitar 1,8 milyar rupiah dari total penerimaan sekitar 3,0 milyar rupiah. Biaya modal yang dibebankan kepada anggotanya sebesar 18,50 persen per tahun. Modal yang diperoleh KSP selain dari biaya modal juga dari pemanfaatan dana pinjaman bank dengan bunga sekitar 11,0 sampai 12,5 persen per tahun. Anggota dapat mengajukan pinjaman kepada KSP maksimal sebesar 3,0 juta rupiah dengan jangka waktu cicilan dalam satu tahun. Dalam memberikan pinjaman, petani tetap meminta agunan berupa surat tanah atau BPKB motor. Hal tersebut guna mendidik disiplin dan tanggung jawab anggota. Selama ini belum ada anggota yang menunggak dalam pembayaran hutang. Bagi para peminjam tidak keberatan atas agunan tersebut karena tidak dibebani dengan kesan harta dilelang bila kredit macet.

Tabel 3. Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Usaha Kertamukti RAT 2010^a

No.	Uraian	Nilai
1.	Biaya modal progresif dihitung dari sisa cicilan (%/bulan)	3,00
2.	Biaya modal dihitung secara <i>flat</i> (%/tahun)	18,50
3.	Biaya modal dihitung secara <i>flat</i> (%/bulan)	1,54
4.	Maksimal besarnya pinjaman (Rp)	3.000.000,00
5.	Penerimaan dari biaya modal anggota inti tahun 2009 (Rp)	561.537.000,00
6.	Penerimaan dari biaya modal anggota tahun 2009(Rp)	803.096.000,00
7.	Penerimaan dari usaha koperasi tahun 2009(Rp)	1.654.208.000,00
8.	Jumlah penerimaan koperasi tahun 2009 (Rp)	3.018.841.400,00
9.	SHU koperasi tahun 2009/RAT Tahun 2010 (Rp)	1.843.284.751,00

^aData diolah dari sumber hasil penelitian Asmani *et.al.* 2011: [Disertasi].

Besarnya pinjaman tersebut kalau digunakan untuk modal berusahatani sangat membantu petani dari jeratan tengkulak. Selanjutnya Asmani *et.al.* (2011) melaporkan bahwa keberadaan KSP tersebut memberikan pengaruh terhadap besarnya biaya modal yang dibebankan oleh tengkulak kepada petani *yarnen* di desa sekitarnya. Biaya modal KSP tersebut sebagai pembanding bagi petani peminjam modal dengan tengkulak. Walaupun biaya modal masih relatif tinggi dibandingkan dengan biaya modal KSP, tetapi jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya modal *yarnen* pada petani sawah lebak di Desa Rambutan. Biaya modal tersebut sebesar 5,0 persen per bulan (Tabel 4).

Tabel 4. Biaya modal petani sawah pasang surut Air Sugihan OKI^a.

No.	Jenis	Nilai (Rp)			
		Pinjam	Pelunasan	Selisih	Selisih Harga
1.	Herbisida	1.620.000,00	1.944.000,00	324.000,00	20%
2.	Benih	234.000,00	351.000,00	117.000,00	50%
3.	Pupuk	236.000,00	318.600,00	82.600,00	35%
Jumlah		2.090.000,00	2.613.600,00	523.600,00	25% (5 bulan) 5% (per bulan)

^aSumber hasil penelitian Asmani *et.al.* 2011: [Disertasi].

Belajar dari kasus KSP Karya Usaha tersebut, dengan adanya suatu kepeloporan, komitmen dari kelompok profesi seperti guru dapat menumbuh dan mengembangkan koperasi pedesaan di sentra produksi pertanian. Koperasi dapat menyediakan modal yang cepat tanpa birokrasi, mudah dapat diakses di desa dekat tempat tinggal, murah dengan bunga yang terjangkau, dan rasa aman karena agunan yang dijamin tidak dibebani rasa takut untuk disita bila kredit macet. Suatu inisiasi yang baik dari pengurus KSP dalam penyediaan modal dapat melakukan kolaborasi dengan pihak perbankan yang berada di ibukota kabupaten atau provinsi karena bank belum terdapat di ibukota kecamatan atau di desa setempat. KSP hanya mengambil margin selisih bunga bank dengan biaya modal yang dibebankan kepada petani. Sebagai gambaran besarnya suku bunga kredit ritel per tahun dari berbagai bank sampai Maret 2012, yakni: Bank Mandiri sebesar 11,998 persen; Bank BRI sebesar 11,503 persen; Bank BNI sebesar 11,650 persen; Bank Bukopin sebesar 13,450 persen; Bank SumselBabel sebesar 12,690 persen (www.bi.go.id). Margin yang diperoleh koperasi dengan kisaran 2,0 sampai 5,0 persen lebih baik daripada biaya modal jika petani memanfaatkan dana dari tengkulak.

KESIMPULAN

1. Petani di sentra produksi padi lahan lebak karena tidak adanya koperasi dan akses dengan perbankan menanggung biaya modal dari tengkulak sebesar 15 persen per bulan yang diperhitungkan dari nilai pupuk dan gabah.
2. Biaya modal yang ditanggung petani dapat mencapai 112 persen per bulan bila seluruh gabah petani setelah disisihkan untuk konsumsi dijual kepada tengkulak.
3. Koperasi simpan pinjam di sentra produksi padi lahan pasang surut membebani biaya modal sebesar 18,50 persen per tahun atau sebesar 1,54 persen per bulan, di bawah biaya modal dari tengkulak sebesar 5,0 persen per bulan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Tingginya biaya modal sistem *yarnen* merupakan disinsentif dalam peningkatan produktivitas padi dan produksi beras, yang dapat berimplikasi bagi ketahanan pangan nasional.
2. Keberadaan koperasi yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan/perbankan di sentra produksi padi yang dapat menekan biaya modal petani, sebagai suatu model kemitraan antara koperasi dengan perbankan dalam upaya menanggulangi tengkulak.
3. Meningkatkan kapasitas SDM lokal dalam pengembangan koperasi pedesaan merupakan suatu alternatif dalam mengatasi kelangkaan tenaga pengelola koperasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Sisvaberti Afriyana atas fasilitas data sekunder.
2. Ketua KSP KSU Karya Usaha atas fasilitas data sekunder.

REFERENSI

- Afriyatna S, Yamin M, Wildayana E. 2011. Faktor Penentu Dampak Adanya Sistem Yarnen dan Tunai dalam Usahatani Padi Sawah Lebak di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin [Thesis]. Palembang: PPS Unsri.
- Asmani N, Sjarkowi F, Susanto RH, Hanafiah KA, Soewarso, Siregar CA. 2011. Analisis Nilai Pendaman Karbon dan Manfaat Deforestasi Ekosistem Rawa Gambut Berbasis HTI Berpola SUPK [Disertasi]. Palembang: Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Arifin MZ, Susanti MA. 2009. Inventarisasi dan karakteristik potensi sumber daya lahan rawa. *dalam* Laporan Tahunan Penelitian Pertanian Lahan Rawa Tahun 2004. Banjarbaru: Balittra.
- Bank Indonesia. 2012. Suku bunga dasar kredit sampai 31 Maret 2012. <http://www.bi.go.id> [diakses 4 Mei 2012].
- Fitriyana G, Yamin M, Adriani D. 2011. Analisis Optimalisasi Penggunaan Faktor Produksi Sistem Yarnen dan Tunai pada Usahatani Padi Lahan Pasang Surut di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin [Thesis]. Palembang: PPS Unsri.
- Noor M. 2007. Rawa lebak: ekologi, pemanfaatan dan pengembangannya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wijaya Adhi IPG, Suariadikarta DA, Sutriadi MT, Subiksa IGM, Suastika IW. 2000. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan lahan rawa. *dalam* Adimihardjo *et.al.* Sumberdaya lahan Indonesia dan pengelolaannya. Bogor: Puslittanak.